

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun ketahun dinilai cukup pesat karena persaingan pasar yang selalu meningkat tiap tahunnya banyak masyarakat yang berlomba-lomba membuka usaha sendiri atau berwirausaha hal ini bisa berdampak positif bagi masyarakat terutama yang belum memiliki pekerjaan karena pelaku usaha tersebut sedikit banyaknya dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Koperasi dan usaha kecil di Kalimantan selatan memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukan melalui jumlah koperasi yang mencapai 2.582 unit hingga tahun 2015 dan sensus BPS pada tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil menurut kategori dan skala usaha di Kalimantan Selatan mencapai 62.915 unit. Jumlah koperasi dan usaha kecil tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian Kalimantan Selatan. Karena berkembang atau tidaknya koperasi usaha kecil tersebut akan berdampak pada perekonomian Kalimantan Selatan dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas koperasi dan menengah melihat besarnya jumlah koperasi dan usaha kecil sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) atau Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai penting. UMKM memiliki kontribusi besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain. (Putri, 2019)

Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan di 13 Kabupaten para pelaku usaha yang terdata 25.371 UKM yang terdampak akibat pandemi covid-19. Program bantuan uang sebesar Rp. 2.400.000. dari pemerintah pusat bekerjasama dengan Bank BNI dan BRI, diharapkan usahanya bisa maju kembali setelah mendapatkan bantuan tersebut. (RH, 2020)

Strategi pemberdayaan koperasi dan usaha tersebut koperasi dan usaha kecil tersebut merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks yang tentu saja akan berpengaruh terhadap koperasi dan usaha kecil. Sehingga baik koperasi maupun usaha kecil harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas.

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangat penting, saat ini mereka sedang gencar-gencarnya melakukan pelatihan dan pembinaan dalam mendukung para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya demi kesejahteraan masyarakat . Dinas Koperasi adalah sebuah wadah bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya, mengingat banyaknya jumlah pengangguran baik yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi maupun rendah serta sulitnya persaingan untuk memperoleh pekerjaan, maka keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan peluang yang besar untuk penyerapan tenaga bagi masyarakat yang ingin berwirausaha melalui pelatihan dan pengembangan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (Hesti Kusuma Wardai Ambar Pertiwi, 2012)

Pelatihan dan pengembangan termasuk dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (*Human Resource management-HRM*) adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, keselamatan mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. (Dessler, Gary, 2015, hal. 4)

Manajemen Sumber Daya Manusia atau (MSDM) adalah ilmu yang mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, masyarakat menjadi maksimal. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting

dalam pencapaian tujuan perusahaan. Keberhasilan suatu Perusahaan tergantung pada sejauh mana Perusahaan itu mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman dari lingkungan eksternal maupun internal dengan segala potensi dari sumber daya yang dimiliki. Pada dasarnya, kualitas perusahaan sangatlah bergantung pada kualitas orang-orang yang berada didalamnya. Manajemen sumber daya manusia hadir untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki angkatan kerja yang berkualitas. (Hery, 2018, hal. 144).

Handoko (200:4) menjelaskan Manajemen Sumber Daya Manusia didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading and controlling, dalam setiap aktifitas atau fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai titik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. . (WordPress, 2017)

Dinas Koperasi dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah dinas yang menaungi lembaga Koperasi dan pelaku-pelaku UMKM yang ada di kalsel. Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rancangan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan PP-18 / 2016 Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tuas pembantuan. (Mariani, 2019)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas pelatihan dan pengembangan merupakan konsep dari sumber daya manusia yang harus ditingkatkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sama halnya seperti yang terjadi di Dinas Koperasi Banjarmasin yang saat ini sedang menyelenggarakan berbagai macam seminar pelatihan pada seluruh pelaku UMKM yang ada di Banjarmasin untuk lebih mengembangkan usahanya, Dinas Koperasi berharap para pelaku Usaha Kecil dan Menengah dapat memproduksi prouduk yang telah di latih dan di dibina sesuai dengan jenis usahanya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul tentang **Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan untuk para mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah tentang manajemen sumber daya manusia mengenai pelatihan dan pembinaan pada UKM di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan di Jl. A. Yani Km 7,5 Pemurus Luar, Kota Banjarmasin ( Kertak Hanyar) 70654.

## 2. Kegunaan Ilmiah

Kegunaan Ilmiah yaitu sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelatihan dan pembinaan pada UKM di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banjarmasin serta diharapkan mampu menjadi pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

## 3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai pelatihan dan pembinaan pada UKM di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini maka peneliti perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. (Hesti Kusuma Wardai Ambar Pertiwi, 2012).
2. Usaha Kecil Menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 menyebutkan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. (Sumberpengertian.id, 2017)

3. Dinas Koperasi dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah dinas yang menaungi lembaga Koperasi dan pelaku-pelaku UMKM yang ada di kalsel. Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rancangan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan PP-18 / 2016 Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tuas pembantuan. (Mariani, 2019).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah merupakan tema baru dan belum banyak diteliti sebelumnya. Setelah dilakukan penelusuran tentang tema

tersebut maka didapatkan beberapa penelitian yang hampir sama, yaitu:

Karya yang pertama adalah skripsi milik Abdul Juli Andi Gani, NIDN.0004075404 pada tahun 2012 dengan judul **”Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang”** tujuan Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahan penelitian ini adalah (1) melaksanakan pemberdayaan UKM (2) factor pendukung dan penghambat. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan merata karena data jumlah UKM belum valid dengan factor pendukung dan penghambatnya.

M. Ibnu Fadhil, NIM.1316021046 pada tahun 2017 dengan judul **”Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandar Lampung Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung”** tujuan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dan dalam penelitian informan *Purposive Sampling*. Lokasi penelitian terletak di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam memperdayaan Pedagang Kaki Lima di kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif pedagang tidak terelalisasi.

Dwi Sepriono Nur, NIM.1002015068 pada tahun 2017 dengan judul **“ Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda”** jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data skunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penyimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di kota Samarinda dengan memberikan kemudahan perijinan serta dukungan serta regulasi yang kuat agar UKM dapat berdaya saing dan mampu tumbuh berkembang, pertumbuhan unit-unit usaha baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu melakukan kegiatan Temu UKM dalam upaya peningkatan jumlah UKM di Kota Samarinda.

Rian Nazarudin, NPM.1351010053 pada tahun 2018 dengan judul **“Analisis Peran Pelatihan Kerja Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja di Bandar Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”** tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pelatihan kerja oleh Balai Latihan Kerja dalam

meningkatkan potensi angkatan kerja di Bandar Lampung ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha menuturkan pemecahan masalah berdasarkan data-data yang ada dan didukung dengan wawancara dan observasi langsung serta kuesioner kepada pegawai dan alumni Balai Latihan Kerja Bandar Lampung. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan sebanyak 98,9% responden menyatakan setuju bahwa dengan adanya pelatihan kerja oleh Balai latihan kerja berdampak positif dalam meningkatkan potensi angkatan kerja demi terwujudnya pengangguran tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun untuk terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah tentang perkembangan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pelatihan serta pengembangan termasuk dalam Manajemen Sumber Daya Manusia.

Bab kedua, membahas tentang peranan Dinas Koperasi dan UKM, pemberdayaan UKM, manajemen sumber daya manusia tentang manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang digunakan untuk meneliti peranan manajemen sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembahasan ini memuat jenis dan pendekatan penelitian.

Bab keempat berisi penyajian dan analisis data dari penelitian tentang peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kendala yang dihadapi dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian tersebut. Kesimpulan adalah hasil dari rumusan masalah dan analisis. Sedangkan saran adalah sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dihadapi.